



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 29 Oktober 2018

Halaman: 2

PEMKOT YOGYA KURANGI BEBAN PERMUKIMAN

Lahan Terbatas, Usul Bangun Rusun Tipe 36

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) berukuran lebih besar dibandingkan rusun sewa umumnya. Usulan pembangunan rusun ke pemerintah pusat itu untuk mengurangi beban permukiman di Kota Yogyakarta. Terutama permukiman yang tidak jelas kepemilikannya.

"Kami mengusulkan pembangunan rusun dengan ukuran lebih luas dengan tipe 36. Harapan kami sebenarnya rusun itu konsepnya rusunami sehingga bisa menjadi hak milik," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi kepada wartawan, Minggu (28/10).

Menurutnya, pembangunan rusun yang menggunakan konsep hunian vertikal itu bisa mengurangi beban permukiman di perkotaan. Beban permukiman di kota semakin berat karena ketersediaan lahan makin terbatas. Pembangunan rusun juga untuk menata lingkungan dan mengurangi kawasan kumuh.

"Yang kita bangun adalah menata lingkungan agar tidak kumuh dan membebani permukiman," ujarnya.

Lokasi yang diusulkan untuk membangun rusun berada di wilayah Kecamatan Tegahrejo. Dia menyampaikan pendanaan rencana pembangunan rumah susun tengah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihaknya berharap proposalnya dapat disetujui dan masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Apalagi beberapa pekerjaan fisik pemkot telah disetujui dengan DAK, misalnya perbaikan dan perluasan Pasar Prawirotaman senilai sekitar Rp 75 miliar.

Dia menyatakan keberadaan rusun itu juga untuk menata permukiman warga yang tidak jelas kepemilikannya. Terutama kepemilikan lahan yang ditempati untuk permukiman warga. Setelah warga di permukiman itu ditata ke rusun, pemkot akan menata lahan itu menjadi ruang publik.

"Bagaimana rusun mengurangi permukiman yang tidak jelas kepemilikannya. Kita dorong mereka memakai rusun. Sementara lingkungannya kita tata menjadi ruang terbuka hijau publik," terang Heroe.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad menjelaskan berdasarkan pemetaan Bappeda di tahun 2015, data bangunan rumah tempat tinggal sebanyak 92.965 unit. Sedangkan proyeksi kebutuhan rumah mencapai 101.526 unit, sehingga masih kekurangan 8.561 unit.

Sementara lahan kosong di Kota Yogyakarta tersisa 549.720 meter persegi atau setara dengan 5.498 unit rumah non vertikal jika dihitung 1 unit rumah seluas 100 meter persegi. Artinya masih ada selisih kekurangan sekitar 3.000 unit.

"Kebutuhan rumah di Kota Yogya cukup besar, sehingga solusinya mengarah ke bangunan vertikal. Bangunan vertikal yang bisa dikelola pemerintah rusunawa. Selisih kekurangan kebutuhan rumah itu menjadi dasar pembangunan rusunawa," ucap Edy.

Bappeda Kota Yogyakarta juga telah mengkaji potensi lahan milik Pemkot Yogyakarta untuk lokasi rusun yaitu di Sorosutan Kecamatan Umbulharjo dan Bener Kecamatan Tegahrejo. Kedua lahan yang memiliki luas masing-masing sekitar 3.000 meter persegi itu telah melalui kajian fisik, luasan, aksesibilitas dan keterkaitan antar wilayah. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPR	<input type="checkbox"/> Negatif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bappeda	<input type="checkbox"/> Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005